



## Pengembangan modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila di sekolah menengah pertama berbasis pesantren

Miftahuddin <sup>a,1\*</sup>, Puji Wulandari Kuncorowati <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

<sup>b</sup> Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

<sup>1</sup> miftahuddin@uny.ac.id\*; <sup>2</sup> puji\_wulandari@uny.ac.id

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 03-07-2018

Revisi : 15-10-2018

Dipublikasikan : 31-10-2018

### Kata kunci:

pendidikan karakter  
Pancasila  
sekolah menengah  
pesantren

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila yang sesuai untuk diterapkan di sekolah menengah (SMP) berbasis pesantren. Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Subjek dalam penelitian ini yaitu para guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP berbasis pesantren yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sekolah yang dipilih adalah SMP yang memang kondusif untuk pelaksanaan pendidikan karakter bangsa Pancasila dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data dengan angket, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila yang dikembangkan menghasilkan modul pembelajaran yang berkualitas dengan kriteria sangat valid menurut ahli materi dengan skor empiris 112 dan ahli media pembelajaran dengan skor empiris 124. Hal itu memiliki makna bahwa modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila sudah layak digunakan pada uji coba setelah dilakukan revisi berdasarkan saran dan masukan para ahli.

### Keywords:

character education  
Pancasila  
sekolah menengah  
boarding school

### ABSTRACT

*This study aims to develop a Pancasila national character education module that is suitable to be applied in boarding-based secondary schools (SMP). The research uses Research and Development model. The subjects in this study were the teachers of the Islamic Boarding School-based Pancasila and Citizenship (PPKn) chosen purposively. The selected school is a junior high school that is indeed conducive to the implementation of Pancasila nation character education and fulfills predetermined criteria. Data collection with questionnaires, interviews, observation, and document analysis. The data analysis technique uses qualitative and quantitative analysis. The results showed that the Pancasila national character education module developed produced a quality learning module with very valid criteria according to content expert judgment with 112 empirical scores and learning media expert judgment with a 124 empirical score. It means that the Pancasila national character education module is appropriate for use in trial after revision based on expert advice and input.*

Copyright © 2018 Miftahuddin dan Puji Wulandari Kuncorowati

### Pendahuluan

Pendidikan karakter menjadi isu utama sejak tahun 2011 yang ditandai dengan menjamurnya berbagai acara dengan label pendidikan karakter. Pada berbagai level ikut membahas pembangunan karakter (*character*

*building*), baik untuk menemukan tipe karakter mana yang ingin dibangun buat anak bangsa ini, maupun untuk menemukan strategi apa yang paling pas dan berhasil dalam membentuk karakter tersebut (Anwar, 2013).

Pendidikan karakter berperan penting dalam membangun karakter warga negara Indonesia agar menjadi warga negara yang memiliki karakter cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan demokratis. Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia seharusnya dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam pengembangan karakter warga negara. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia sejak lama. Oleh karena itu, Pancasila sangat sesuai dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila sudah semestinya menginternalisasi setiap diri warga negara Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menginternalisasi dalam setiap diri warga negara Indonesia. Apalagi, di tengah era globalisasi yang semakin mengaburkan batas-batas wilayah negara. Informasi yang datang dari negara lain berpotensi mengaburkan pemahaman dan pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Istilah karakter secara luas dipahami untuk mencakup aspek kognitif, emosional, dan perilaku kehidupan moral yang terdiri dari pemahaman, kepedulian, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika (Lickona, Schaps, & Lewis, 2002). Makna ini menyiratkan bahwa karakter tidak hanya cukup mencakup kemampuan seseorang secara pengetahuan saja, tetapi sampai pada bagaimana seseorang itu mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan karakter yang dikembangkan. Karakter tidak sebatas pada pengetahuan, melainkan juga mencakup bagaimana pengetahuan itu diterjemahkan dalam sikap dan perilaku seseorang. Dengan demikian, menurut penjelasan ini istilah karakter memiliki makna yang lebih luas.

Kalidjernih (2010) menjelaskan bahwa istilah karakter berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *character*. Istilah ini dipahami sebagai kualitas-kualitas moral yang awet dan terdapat atau tidak terdapat pada setiap individu yang mengekspresikan melalui pola-pola perilaku atau tindakan yang dapat

dievaluasi dalam pelbagai situasi. Dalam pengertian ini, karakter dimaknai bukan sekadar sikap atau pengetahuan yang dimiliki manusia tentang hal-hal yang baik, tetapi harus diaplikasikan sehingga dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain dalam perilaku sehari-hari.

Karakter yang baik memiliki komponen yang terdiri dari *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (perilaku moral). Masing-masing komponen memiliki sub-sub yang lebih banyak, sehingga apabila semua komponen itu dimiliki oleh seorang manusia maka dapat dikatakan bahwa manusia tersebut memiliki karakter yang baik. Masing-masing komponen karakter yang baik saling memiliki keterkaitan dalam rangka membentuk warga negara yang berkarakter baik. Dengan kata lain, warga negara tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hal yang baik, tetapi juga harus bersikap dan berperilaku yang baik pula.

Untuk dapat menjadikan seseorang memiliki karakter yang baik, perlu dilakukan melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki makna tidak hanya mengajarkan akan hal benar salah, tetapi lebih kepada menanamkan kebiasaan (*habits*) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik memiliki kesadaran, dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2013). Hal ini yang membedakan dengan pendidikan moral, dimana pendidikan moral terbatas pada mengajarkan pada benar salah untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang bermoral baik.

Terkait dengan karakter ini, ketika ditarik pada level bangsa, maka karakter bangsa bukan agregasi karakter perorangan, karena karakter bangsa harus terwujud dalam rasa kebangsaan yang kuat dalam konteks kultur yang beragam. Karakter bangsa mengandung perekat kultural, yang harus terwujud dalam kesadaran kultural (*cultural awareness*) dan kecerdasan kultural (*cultural intelligence*) setiap warga negara. Karakter menyangkut perilaku yang amat luas karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kerja keras, kejujuran,

disiplin mutu, estetika, komitmen, dan rasa kebangsaan yang kuat. Perlu dirumuskan esensi nilai-nilai yang terkandung dalam makna karakter yang berakar pada filosofi dan kultur bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan antar bangsa

Pendidikan karakter tidak dapat dilakukan di dalam suatu ruang hampa (*vacuum tube*) yang bebas nilai, karena karakter sangat erat (*bounded*) dengan kehidupan (Suryadi, 2012). Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah tidak dapat berhasil dengan baik, apabila pembelajaran yang dilakukan hanya berupa hafalan secara verbalistis. Tidak ada jaminan jika pendidikan karakter itu berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, maka akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah hendaknya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran.

### Metode

Penelitian ini merupakan penelitian *Reserach and Development (R & D)* dengan mengadopsi model yang dikembangkan oleh Gall, Gall, & Borg (2003). Alasan pemilihan jenis penelitian ini karena bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan karakter bangsa Pancasila di SMP berbasis pesantren dan perangkat pendukungnya, seperti modul dan buku panduan guru. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan, meliputi: a) melakukan penelitian pendahuluan yang mencakup kegiatan studi pustaka dan observasi lapangan sebagai dasar dalam mengembangkan produk model dan perangkat pendukung pembelajaran yang akan dihasilkan, b) mengadakan perencanaan, mencakup kegiatan pengembangan pendidikan karakter bangsa Pancasila sesuai dengan kurikulum yang berlaku, c) mengembangkan modul pembelajaran untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, d) uji ahli yaitu 2 orang yang terdiri dari 1 orang ahli materi dan 1 orang ahli media pembelajaran, e) uji coba lapangan skala kecil dan revisi, dan f) uji coba lapangan utama dan revisi. Pada tahun kedua ini langkah penelitian yang dikembangkan

sampai pada tahap pengembangan modul pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan Pancasila di sekolah menengah berbasis pesantren.

### Hasil dan Pembahasan

Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan karakter dapat dilakukan melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Integrasi tersebut dilakukan pada proses penyusunan rencana pembelajaran dengan mengembangkan modul pendidikan karakter. Salah satu integrasi pendidikan karakter dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan yang berupaya untuk membentuk warga negara yang berkarakter baik. Proses pembentukan warga negara yang baik ternyata tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang bersifat *top down* (dari Pemerintah Pusat), namun *bottom-up* (dari bawah-akar rumput) yang kontekstual (Suyato, 2016).

Dalam perspektif yang lain, upaya pembentukan warga negara yang baik secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu di sekolah dan di luar sekolah. Berdasarkan hasil penelitian di kawasan lain, hubungan antara aktivitas di kelas dan pembentukan komitmen kewargaan dan partisipasinya. Komitmen dan keterlibatan warga merupakan ramuan penting yang dibutuhkan bagi *active informed citizens*. Penelitian Kahne & Sporte (2008) menemukan bahwa pengalaman di sekolah yang memfokuskan secara langsung pada isu-isu politik dan kewargaan dan cara bertindak. Penelitian Torney-Purta, Amadeo, & Richardson (2007) dan Gibson & Levine (2003), diperkuat oleh Saha & Print (2010) yang menemukan hubungan antara beragam praktik di ruang kelas dengan komitmen terhadap partisipasi kewargaan serta peningkatan partisipasi. Terakhir, temuan dari Keating (2009) dinyatakan dalam laporan tahunan ketiga mereka bahwa salah satunya pembelajaran masih menggunakan cara-cara tradisional (*teacher centered*) dari pada menggunakan ICT. Dengan demikian, dalam konteks pembudayaan nilai-nilai Pancasila menjadi karakter baik bagi peserta didik di sekolah menengah berbasis pesantren, maka dibuatlah modul terkait hal tersebut.

Bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu mempertahankan budayanya sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lain. Mempertahankan budaya bangsa di tengah gempuran budaya asing merupakan hal yang tidak mudah. Sistem pendidikan khas Indonesia yakni pesantren yang hadir menjawab kebutuhan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang tidak hanya dalam pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga iman dan takwa yang diarahkan pada pencapaian kualitas hidup manusia agar memiliki kecakapan hidup yang seimbang antara duniawi dan akhirat (Arpanudin, 2016).

Dalam merancang modul ini, data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian dianalisis. Tujuan dari proses analisis data yakni untuk menjawab tujuan penelitian yaitu menghasilkan modul

pembelajaran PPKn yang memenuhi kriteria layak untuk digunakan dalam pembelajaran PPKn dan berkualitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa komentar dan saran dianalisis secara kualitatif, selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk merevisi produk yang dikembangkan.

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana modul dan instrumen evaluasi yang telah dibuat memenuhi kriteria valid berdasarkan penilaian ahli dengan menggunakan lembar validasi. Kriteria kevalidan perangkat pembelajaran di sini adalah kriteria kevalidan modul. Pada tabel 1 disajikan nilai dari skor minimal ideal, skor maksimal ideal, rata-rata ideal, dan simpangan baku ideal dari modul pembelajaran PPKn yang telah dihasilkan.

Tabel 1. Skor Minimal Ideal, Skor Maksimal Ideal, Rata-rata Ideal, dan Simpangan Baku Ideal untuk Kevalidan Modul

Komponen	Banyak Item	Skor Minimal Ideal	Skor Maksimal Ideal	$\bar{x}_i$	Sbi
Aspek Materi	27	27	135	81	18
Aspek Media	28	28	140	84	18.67

Sumber: data diolah penulis, 2018.

Penilaian oleh ahli bertujuan untuk melihat isi dari draf 1 modul yang telah dikembangkan. Penilaian juga bertujuan untuk menggali komentar dan saran baik secara tertulis atau lisan dengan cara berdiskusi mengenai modul yang telah dikembangkan. Penilaian ahli merupakan kegiatan validasi modul sebelum diujicoba. Validasi dilakukan dengan cara memberikan produk yang dikembangkan yakni modul pembelajaran PPKn kepada dosen ahli materi dan media.

Tabel 2. Data Hasil Validasi Modul Pembelajaran PPKn

Ahli	Skor Penilaian Modul	
	Modul	
	Materi	Media
1	113	
2	124	

Sumber: data diolah penulis, 2018.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari hasil validasi modul dari aspek materi diperoleh skor 113 dengan rentang skor 27-135. Total skor untuk modul dari aspek media

diperoleh skor 124 dengan rentang skor 28-140. Selain memberikan penilaian, terdapat sejumlah masukan dari ahli atau validator yang digunakan untuk melakukan revisi terhadap modul pembelajaran PPKn yang dikembangkan.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas analisis data kevalidan modul. Analisis data kevalidan modul diperoleh dari data hasil validasi ahli materi dan media. Penjelasan mengenai analisis data diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil validasi ahli dapat diketahui sejauh mana modul pembelajaran PPKn yang telah dibuat memenuhi kriteria valid. Data berupa skor penilaian dari ahli untuk modul pembelajaran PPKn dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Total Skor Empiris Hasil Validasi Modul dan Instrumen Evaluasi

Komponen	Total Skor Empiris	Kategori
Aspek Materi	113	Sangat Valid
Aspek Media	124	Sangat Valid

Sumber: data diolah penulis, 2018.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa modul baik dari aspek materi berada pada kategori sangat valid dengan total skor empiris 113, disisi lain dari aspek media berada pada kategori sangat valid dengan total skor empiris 124. Data tersebut bermakna bahwa modul pembelajaran PPKn sudah layak digunakan pada uji coba setelah dilakukan revisi berdasarkan saran dan masukan para ahli. Sebagai kelengkapan analisis akan disajikan hasil penilaian modul pembelajaran PPKn berdasarkan masing-masing aspek dan butir yang dinilai.

Tabel 4. Data Hasil Validasi Modul Berdasarkan Aspek Materi

No.	Aspek yang Dinilai	Skor Empiris	Kategori
Aspek Materi			
1.	Aspek Pendahuluan	9	Sangat valid
2.	Aspek Pembelajaran	30	Sangat Valid
3.	Aspek Isi	31	Sangat Valid
4.	Aspek Tugas/Evaluasi	24	Sangat Valid
5.	Aspek Rangkuman	19	Valid

Sumber: data diolah penulis, 2018.

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa aspek materi pada modul yang dinilai mencapai kategori “sangat valid” dengan masing-masing butir pernyataan yang dinilai mencapai kategori “sangat valid” untuk aspek pendahuluan, pembelajaran, isi, dan tugas/evaluasi, sedangkan aspek rangkuman berada pada kriteria “valid”.

Tabel 5. Data Hasil Validasi Modul Berdasarkan Aspek Media

No.	Aspek yang Dinilai	Skor Empiris	Kategori
Aspek Media			
1.	Aspek Fisik/Tampilan	35	Sangat Valid
2.	Aspek Pendahuluan	17	Sangat Valid
3.	Aspek Pemanfaatan	27	Sangat Valid
4.	Aspek Tugas/Evaluasi	27	Sangat Valid
5.	Aspek Rangkuman	18	Sangat Valid

Sumber: data diolah penulis, 2018.

Pada tabel 5 terlihat bahwa aspek media pada modul yang dikembangkan telah memenuhi kategori “sangat valid” pada semua aspek yang dinilai.

Tabel 6. Data Hasil Validasi Modul Berdasarkan Aspek Materi

No.	Aspek yang Dinilai	Skor Empiris	Kategori
Aspek Materi			
1.	Aspek Pendahuluan	5	Kurang Valid
2.	Aspek Pembelajaran	16	Kurang Valid
3.	Aspek Isi	20	Cukup Valid
4.	Aspek Tugas/Evaluasi	14	Kurang valid
5.	Aspek Rangkuman	15	Cukup Valid

Sumber: data diolah penulis, 2018

Tabel 7. Data Hasil Validasi Modul Berdasarkan Aspek Media

No.	Aspek yang Dinilai	Skor Empiris	Kategori
Aspek Media			
1.	Aspek Fisik/Tampilan	21	Kurang Valid
2.	Aspek Pendahuluan	12	Cukup Valid
3.	Aspek Pemanfaatan	19	Cukup Valid
4.	Aspek Tugas/Evaluasi	18	Cukup Valid
5.	Aspek Rangkuman	10	Kurang Valid

Sumber: data diolah penulis, 2018

Masukan dari ahli materi antara lain: peta konsep sesuaikan dengan KD dan Indikator, perbaiki beberapa istilah yang kurang tepat, setiap aktivitas mohon disertakan petunjuk yang jelas, refleksi dikaitkan dengan peta konsep dan materi, kata-kata atau kalimat dalam setiap anjuran sesuaikan dengan materi, uji kompetensi sesuaikan dengan indikator, kaitkan refleksi dengan kehidupan sekolah berbasis pesantren, dan contoh-contoh kaitkan dengan sekolah berbasis pesantren.

Sementara masukan dari ahli media antara lain: gambar burung garuda Pancasila di beberapa halaman mengganggu keterbacaan teks, ada beberapa halaman yang komposisi warnanya kurang cerah atau terlalu gelap, jangan gunakan font yang berkaki agar mudah untuk dibaca, dan gambar yang muncul di setiap halaman pada bagian atas terkesan membosankan karena diulang-ulang setiap halaman.

Pengembangan modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila setidaknya memuat rumusan enam karakter utama (pilar karakter) dalam diri manusia yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai watak dan perilakunya dalam hal-hal khusus diantaranya: *respect* (penghormatan), *responsibility* (tanggung jawab), *citizenship civic duty* (kesadaran kewarganegaraan), *fairness* (keadilan dan kejujuran), *caring* (kepedulian dan kemauan berbagi), dan *trustworthiness* (kepercayaan) (Mu'in, 2011).

### Simpulan

Modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila yang dikembangkan di sekolah menengah berbasis pesantren jika dilihat dari aspek kelayakan materi dalam kategori sangat valid. Modul pendidikan karakter kebangsaan Pancasila yang dikembangkan di sekolah menengah berbasis pesantren jika dilihat dari aspek kelayakan media dalam kategori sangat valid. Perbaikan dari ahli materi antara lain, perlunya memasukkan contoh-contoh yang konkrit tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, dan materi perlu disajikan secara runtut. Perbaikan dari ahli media antara lain, gambar-gambar untuk memperjelas penjelasan materi agar ditambah dan menggunakan ukuran huruf yang standar agar mudah untuk dibaca.

### Referensi

- Anwar, H. S. (2013). Membangun karakter bangsa. *Jurnal At-Ta'dib*, 8(1), 1–17.
- Arpanudin, I. (2016). Implementasi nilai sosial ukhuwah islamiah di pondok pesantren. *Humanika*, 16(1), 1–21.
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2003). *Educational research: an introduction* (Seventh Ed). Boston: Longman Publishing.
- Gibson, C., & Levine, P. (2003). *The civic mission of schools*. New York.
- Kahne, J. E., & Sporte, S. E. (2008). Developing citizens: the impact of civic learning opportunities on students' commitment to civic participation. *American Educational Research Journal*, 45(3), 738–766.
- Kalidjernih, F. K. (2010). Situasionisme: Refleksi untuk Pendidikan Karakter di Indonesia. In *Seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Program Studi PKn SPs UPI*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Keating, A., Kerr, D., Lopes, J., Featherstone, G., & Benton, T. (2009). *Embedding citizenship education in secondary schools in England (2002-08) citizenship education longitudinal study seventh annual report*. London. Diambil dari <http://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/11372%0A>
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2002). *Eleven principles of effective character education. Character Education Partnership*. Washington, D.C. Diambil dari <http://ezproxy.umsl.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eft&AN=507718881&site=ehost-live&scope=site>
- Mu'in, F. (2011). *Pendidikan karakter (konstruksi teoritis dan praktek)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saha, L. J., & Print, M. (2010). Student school elections and political engagement: A cradle of democracy? *International Journal of Educational Research*, 49(1), 22–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2010.05.004>
- Suryadi, A. (2012). *Outlook 2025 pembangunan pendidikan Indonesia: Menuju kualitas yang berdaya saing secara global*. Jakarta.
- Suyato. (2016). Belajar demokrasi di sekolah: Reorientasi pendidikan dan pengembangan kultur sekolah yang humanis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1), 83–95.
- Torney-Purta, J., Amadeo, J., & Richardson, W. (2007). Civic service among youth in Chile, Denmark, England and the United States: A psychological perspective. In S. M. & A. McBride (Ed.), *Civic Service Worldwide: Impacts and Inquiries* (hal.

95–132). Armonk, NY: M.E. Sharpe.